

**SISTEM
ADMINISTRASI
NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA
(SANKRI)**

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEPEMIMPINAN TINGKAT IV**

SANRI
ery@laudin
1

Materi pokok

Lembaga-lembaga Negara

Pemerintah Pusat

Pemerintah Daerah

Lembaga Non Struktural

Tata Hubungan antar
Pemerintah Pusat dan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah

SANRI
ery@laudin
4

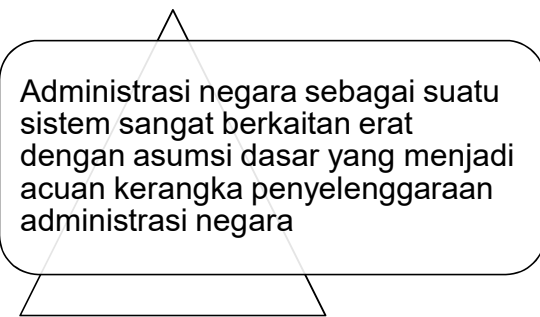
About me

N a m a : ERYA AFRIANUS
Jabatan : Widyaiswara Madya
Rumah : Jl. Pradana 5 No. 1 Villa Pabuaran Indah
Kec. Bj Gede Kab. Bogor.
: 0 8 121 99 63336
: eryl.audin@gmail.com
: eryl@bps.go.id



eryl@laudin
STANDAR ETIKA PUBLIK
2

ADMINISTRASI NEGARA



Administrasi negara sebagai suatu sistem sangat berkaitan erat dengan asumsi dasar yang menjadi acuan kerangka penyelenggaraan administrasi negara

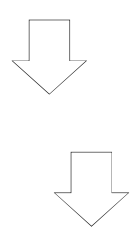
SANRI
ery@laudin
5

Deskripsi Singkat

Mata Diklat ini membekali peserta dengan kemampuan menjelaskan posisi dan kedudukan unit organisasinya dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pembelajaran lembaga-lembaga negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga non struktural.

SANRI
ery@laudin
3

SISTEM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA (LUAS)



Sistem Penyelenggaraan
Negara

Keseluruhan kegiatan
negara (lembaga negara),
dalam rangka mewujudkan
tujuan dan cita-cita negara

SANRI
ery@laudin
6

PENYELENGGARAAN NEGARA

Fungsi Konstitutif,
Fungsi Eksekutif,
Fungsi Legislatif,
Fungsi Yudikatif, dan
Fungsi Auditif,
serta Pejabat lain yang fungsi dan tugasnya
berkaitan dengan penyelenggaraan negara
sesuai dengan ketentuan peraturan yang
berlaku

SANRI

ery@laudin

7

Tujuan :

Alinea ke 4
pembukaan
UUD-NRI 1945

Sarana :

Dana dan daya
(pemerintah
maupun
masyarakat)

Manusia :

Aparatur negara
beserta seluruh
rakyat

Kerjasama :

Antara aparatur
Dengan
Masyarakat
(kemitraan)

Tugas :

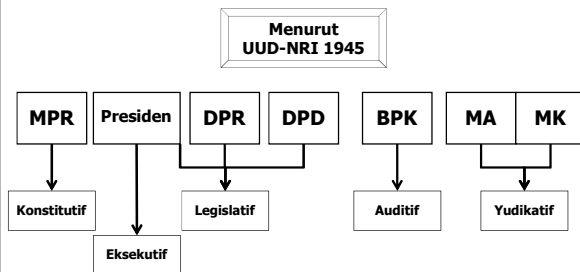
Tugas Umum
Pemerintahan
Tugas
Pembangunan

SANRI

ery@laudin

10

KEDUDUKAN DAN SUSUSNAN LEMBAGA NEGARA



SANRI

ery@laudin

8

PENYELENGGARA NEGARA = APARATUR NEGARA + RAKYAT

Sistem Administrasi Negara Indonesia

→ Sistem Penyelenggaraan Negara : sistem penyelenggaraan kehidupan negara dan bangsa dalam segala aspeknya, dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan keseluruhan aparatur negara beserta seluruh rakyat, di seluruh wilayah negara Indonesia, serta segenap dana dan daya yang tersedia secara nasional, demi tercapainya tujuan dan terlaksananya tugas nasional/negara sebagaimana tersebut dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

SANRI

ery@laudin

11

SISTEM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA (SEMPIT)

Sistem Penyelenggaraan
Pemerintahan Negara

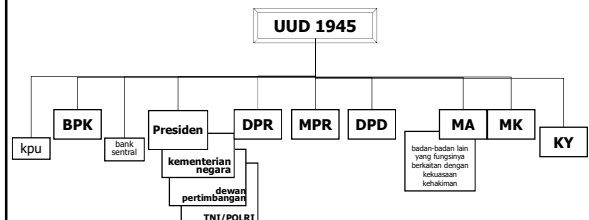
Keseluruhan kegiatan
eksekutif, dalam rangka
mewujudkan tujuan dan
kebijakan negara/pemerintah

SANRI

ery@laudin

9

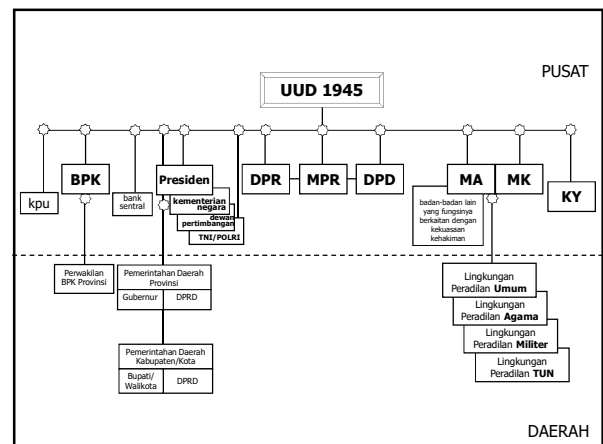
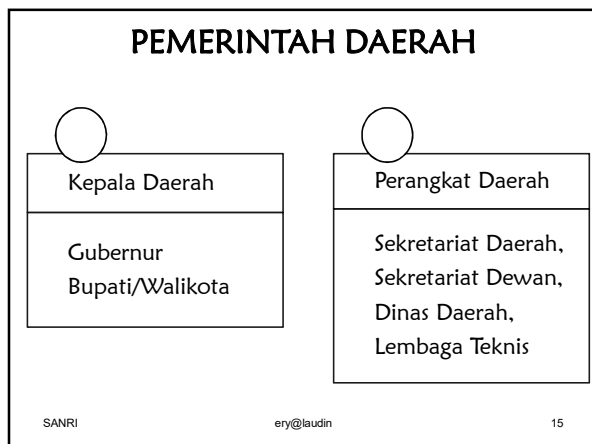
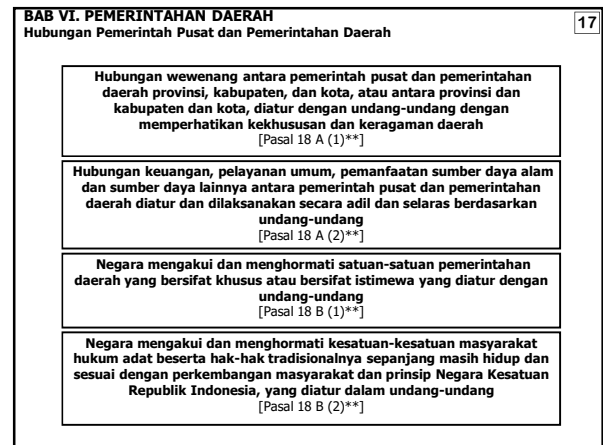
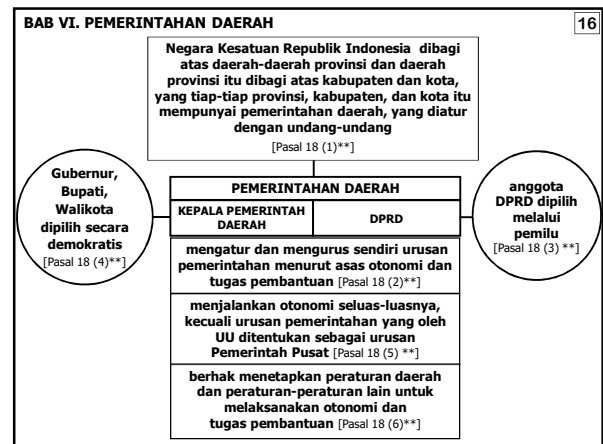
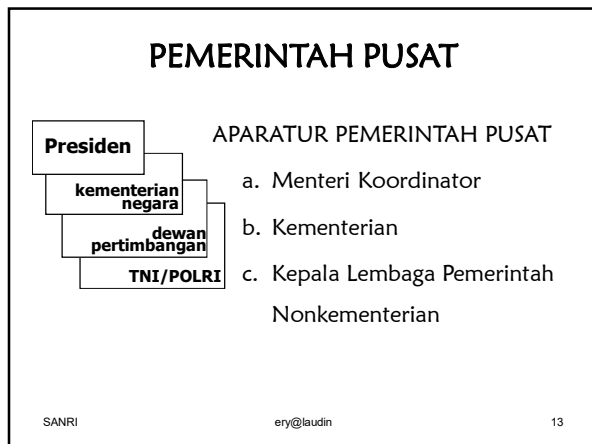
LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

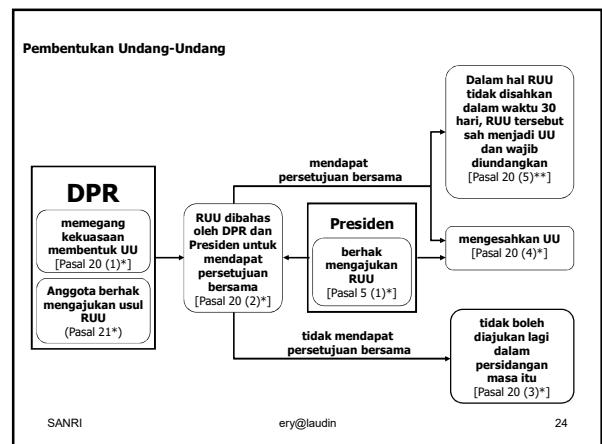
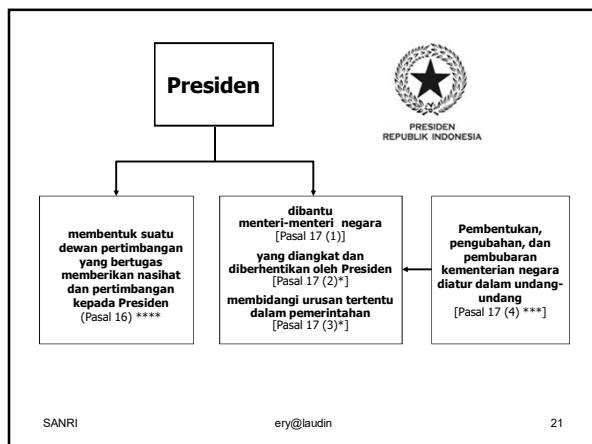
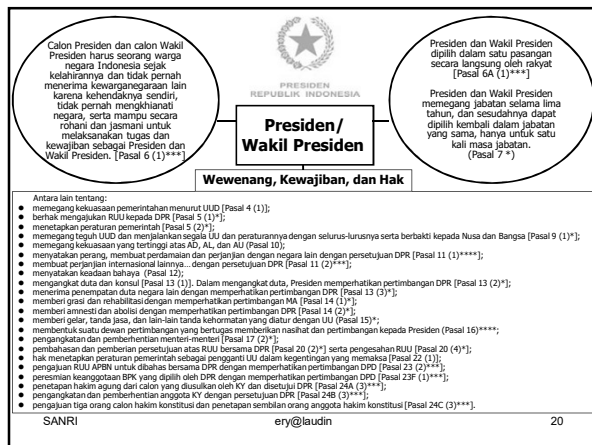
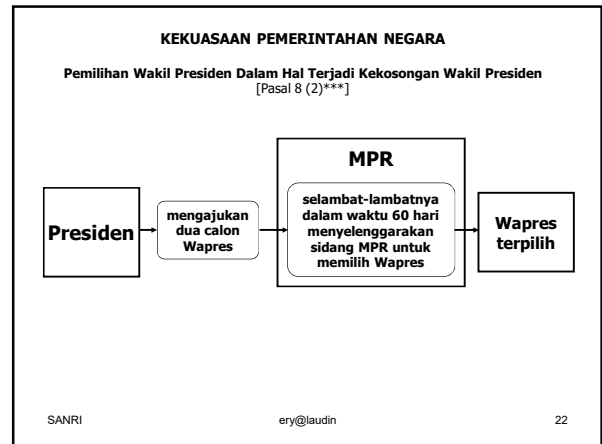


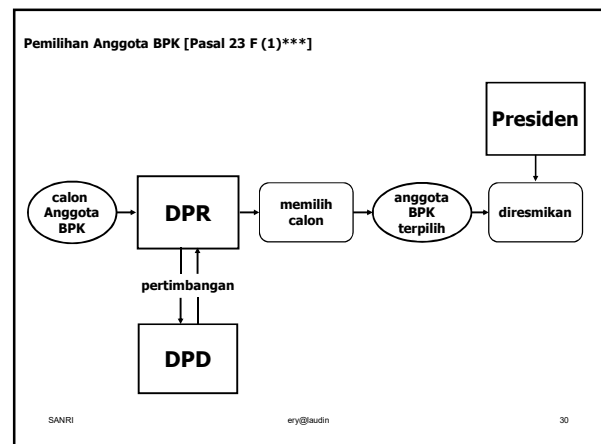
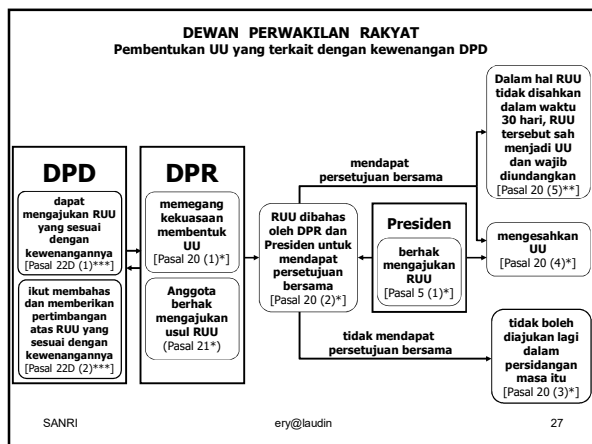
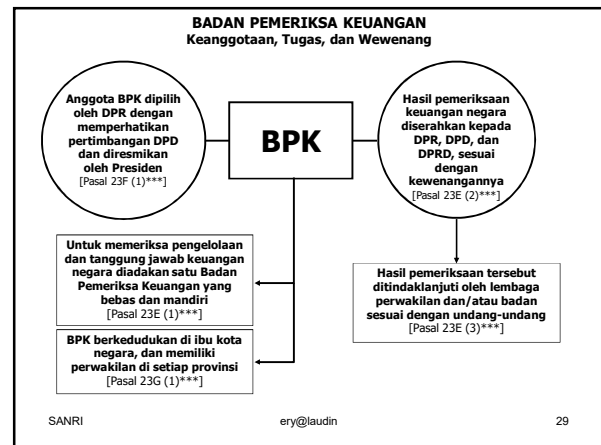
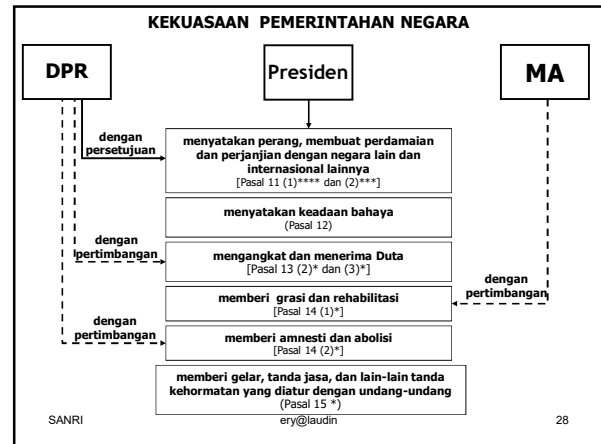
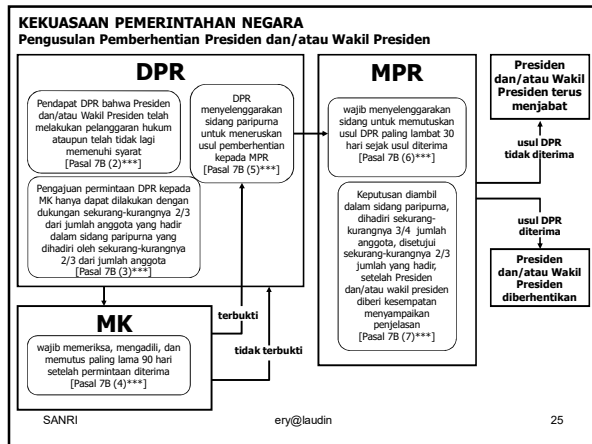
SANRI

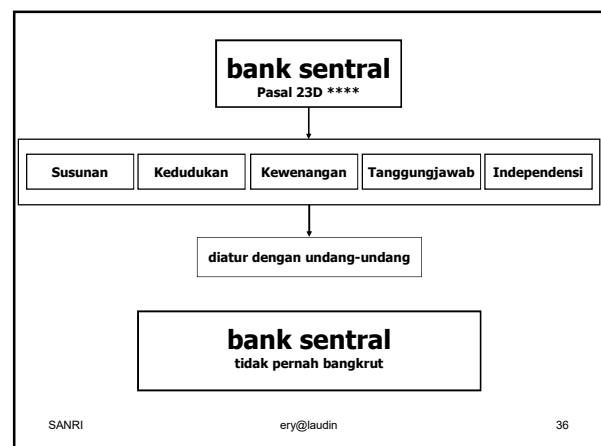
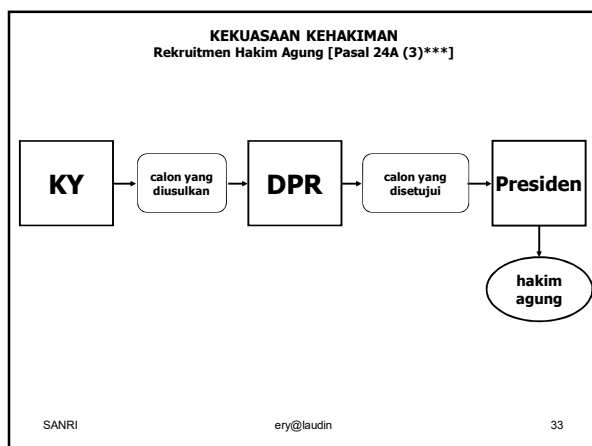
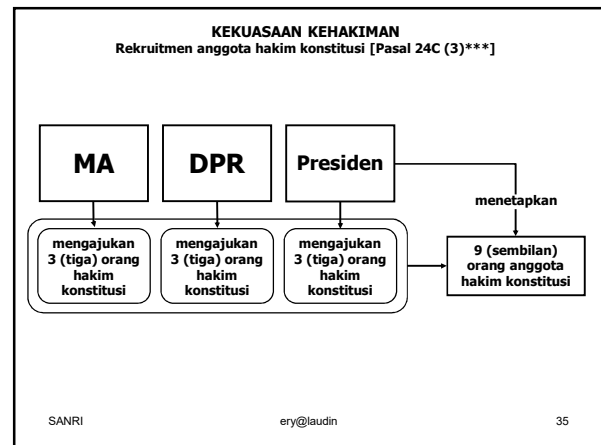
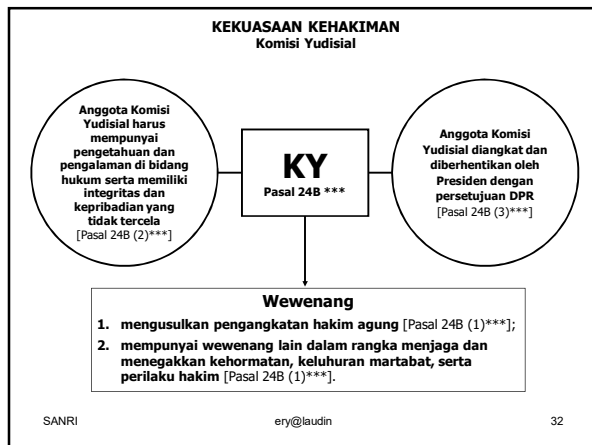
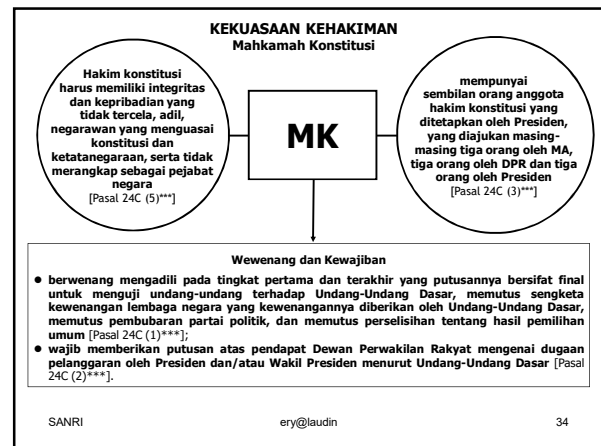
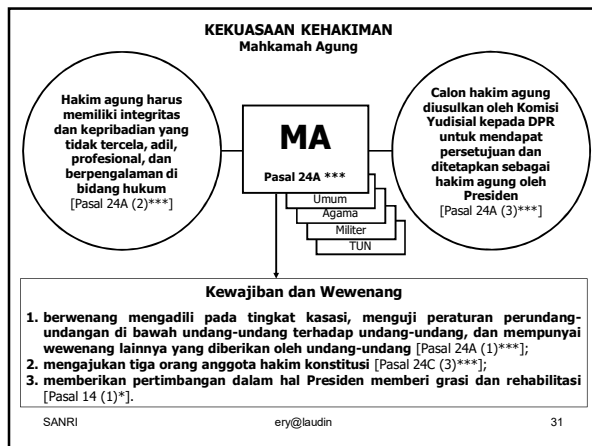
ery@laudin

12









Lembaga non Struktural

Lembaga nonstruktural (disingkat LNS) adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah, yang dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, serta dibiayai oleh anggaran negara.

LNS tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, namun dalam dinamika penyelenggaraan negara dan pemerintahan terdapat tugas dan fungsi lain yang dinilai harus diselenggarakan, sehingga perlu dibentuk lembaga independen.

<http://www.menpan.go.id/kelembagaan/549-lembaga-non-struktural>

ADA 88 LEMBAGA NON STRUKTURAL

SANRI

ery@laudin

37

KESIMPULAN

SISTEM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| kegiatan negara (lembaga negara), dalam rangka mewujudkan tujuan dan cita-cita negara | Fungsi Konstitutif, | |
| | Fungsi Eksekutif, | |
| | Fungsi Legislatif, | |
| | Fungsi Yudikatif, dan | |
| | Fungsi Auditif, | |
| kegiatan eksekutif, dalam rangka mewujudkan tujuan dan kebijakan negara/pemerintah | Pemerintah Pusat | Lembaga pemerintah Nonkementerian |
| | Pemerintah daerah | |

SANRI

ery@laudin

40

Badan/Lembaga non Struktural



SANRI

ery@laudin

38

Lalu....

Bagaimana dengan Organisasi Kita



SANRI

ery@laudin

41

Badan/Lembaga non Struktural



SANRI

ery@laudin

39

PEMERINTAH PUSAT

APARATUR PEMERINTAH PUSAT

- Menteri Koordinator
- Kementerian
- Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian

SANRI

ery@laudin

42

Lembaga Pemerintah Nonkementerian

adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden.

<http://www.menpan.go.id/kelembagaan/548-lembaga-pemerintah-non-kementerian>
ADA 28 LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN



SANRI



ery@laudin



43

JABATAN :
STRUKTURAL
ESELON IV

- Fungsi
- Tugas
- Hak
- Kewajiban
- Kewenangan
- Kebijakan

SANRI

ery@laudin

44



SANRI

ery@laudin

45